

BAB 1

PENDAHULUAN

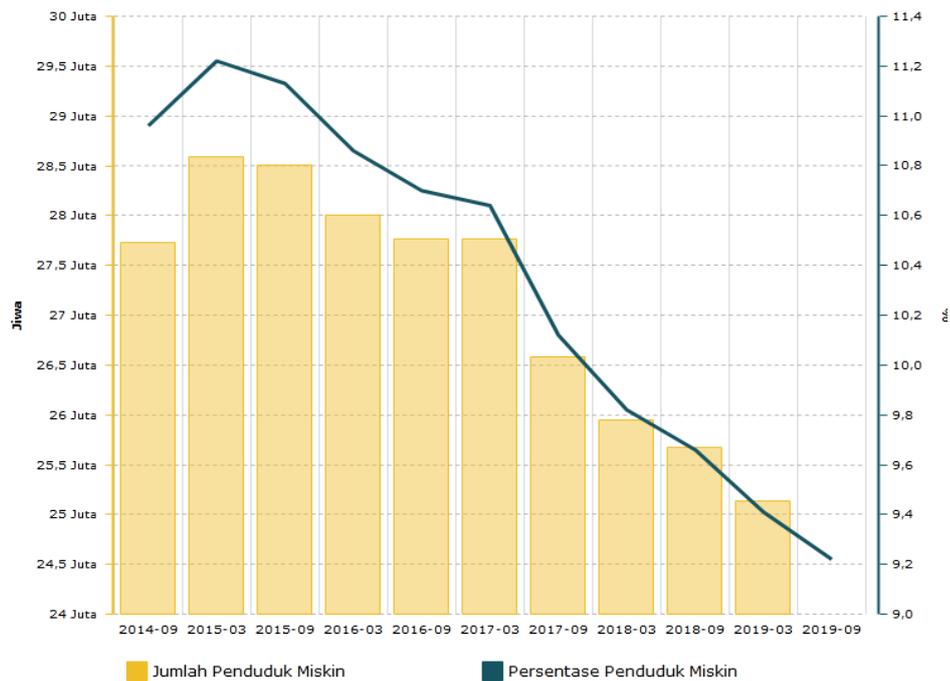
1.1 Identifikasi Masalah

Kemiskinan dianggap sebagai masalah atau *problema* bagi negara-negara di dunia yang masih dihadapi sampai sekarang. Masalah tersebut biasanya diawali dengan adanya masalah pengangguran yang pada akhirnya menjadi ketimpangan. Pada beberapa kasus kemiskinan selalu berawal dari kekurangan penghubung oleh tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang ada (Abie, 2017). Sampai sekarang kemiskinan dianggap sebagai masalah terberat di dunia.

Kemiskinan yaitu masalah yang dialami bagi seluruh negara, baik negara maju atau berkembang seperti negara Indonesia. Kemiskinan adalah *problema* kompleks yang terjadi akibat banyak hal dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Faktor tersebut diantaranya adalah tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan serta lainnya (Sukmaraga, 2011)

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 telah menyatakan jumlah masyarakat miskin yang ada di negara Indonesia sebesar 39,05 juta jiwa. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) , angka jumlah kemiskinan di Indonesia saat masa pemerintahan era sekarang yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun tidak secara signifikan. Pada tahun 2019 , terjadi penurunan angka persentase penduduk miskin sebesar 9,41 dari tahun sebelumnya yaitu 9,82 pada tahun 2018. Artinya terjadi penurunan sebesar 0,41% walaupun tidak mencapai 1%.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah & Persentase Masyarakat Miskin September 2014- Maret 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Penurunan angka kemiskinan yang cukup baik terjadi pada tahun 2017 dari 10,70% pada bulan September 2016 menjadi 10,12% pada bulan September 2017. Atau dari 27,76 juta penduduk miskin menjadi 26,58 juta dalam setahun. Ini disebabkan keberhasilan salah satu dari agenda-agenda pemerintah.

Meskipun angka kemiskinan pada masa pemerintahan sekarang terjadi pengurangan selama periode tahun ke tahun tetapi pengurangan tersebut tidak terlalu besar atau signifikan. Pencapaian keberhasilan penurunan tersebut bukan hanya karena program pemerintah sekarang, tapi juga kerja keras pemerintahan yang sebelumnya. Jika dibandingkan laju penurunan kemiskinan era pemerintahan sekarang dengan pemerintahan sebelumnya, maka pada masa sekarang bisa dikatakan paling lambat. Pada era pemerintahan tahun 2004 sampai 2014 angka kemiskinan sebesar 840 ribu jiwa per tahun turun 5,4 persen dalam 10 tahun. Era masa pemerintahan 2001 sampai 2004 sebesar 570 ribu jiwa per tahun atau turun 1,75 persen dalam 3 tahun. Era masa pemerintahan tahun 1998 sampai 1999 sebesar 1,53 juta jiwa per tahun atau turun 0,77 persen setahun. Dan laju penurunan kemiskinan tercepat yakni pada era masa pemerintahan tahun 1999 sampai 2001, sebesar 5,05 juta jiwa per tahun (turun 5,02 persen dalam 2 tahun).

Pemerintah terus berusaha mengurangi angka kemiskinan setiap tahun, tapi jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih belum berkurang secara signifikan. Meskipun BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat penurunan angka kemiskinan pada data, tapi berdasarkan mutunya masih belum terlihat pengaruhnya bahkan bisa dikatakan keadaannya menjadi serius dan memprihatinkan. Bahkan segala cara telah dilaksanakan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut.

Perkembangan perbankan syariah di negara Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang cukup bagus. Dikatakan lebih bagus karena selain melihat perkembangan jumlah Bank Syariah-nya, total asetnya juga meningkat. OJK telah mengungkapkan aset perbankan syariah (BUS & UUS) mengalami peningkatan dari Rp 466,8 triliun pada Januari 2019 menjadi Rp 515,3 triliun pada Januari 2020.

Sehingga dengan telah membuktikan perkembangan yang bagus tersebut, diharapkan perbankan syaria'ah mampu memberikan banyak harapan salah satunya mengenai problema kemiskinan. Perbankan syariah diharapkan bisa berperan dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu peran dari bank syariah dalam memperhatikan golongan masyarakat menengah bawah adalah memberikan pembiayaan terhadap UMKM baik itu pada aspek penggunaan untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi.

Dalam penyaluran kebutuhan masyarakat, maka pembiayaan yang diberikan dari Bank Umum Syariah (BUS) menyesuaikan dengan seberapa besar permintaan dana dalam memenuhi keinginan masyarakat atau nasabah. Sementara itu, dalam sektor ekonomi di Indonesia yang paling besar dalam pergerakan perekonomian adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dibuktikan terjadinya krisis Ekonomi pada tahun 1998, hanya sektor UMKM bertahan saat terjadi krisis Ekonomi 1998, sementara sektor yang besar tumbang dengan adanya krisis (Safarinda, 2018).

Lembaga Keuangan di negara Indonesia ada dua yaitu yang pertama lembaga keuangan dengan prinsip ekonomi konvensional dan yang kedua dengan prinsip ekonomi syariah. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dikatakan cukup bagus. Dari pertumbuhan aset pada bank syariah dapat dilihat

sebagiannya untuk pembiayaan UMKM. Ini menunjukkan bank syari'ah ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Berikut merupakan data pertumbuhan pembiayaan pada BUS & UUS atas dasar golongan penggunaan untuk UMKM.

Tabel 1.1 Pembiayaan Oleh BUS & UUS Berdasarkan Jenis Penggunaan untuk UMKM Pada Tahun 2017-2019 (Miliar Rupiah)

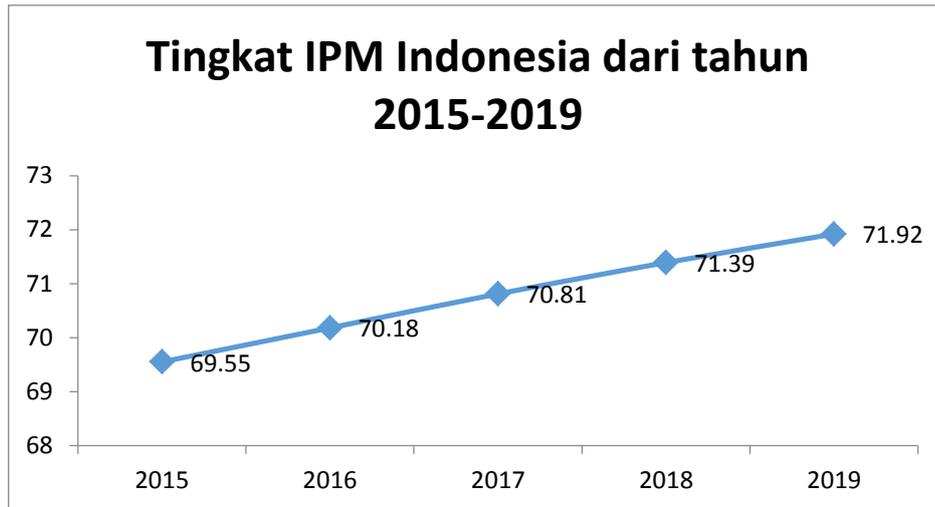
Tahun	Modal Kerja	Investasi	Total
2017	435.199	238.388	673.587
2018	450.158	265.752	715.910
2019	467.669	279.670	747.339

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada tabel diatas terlihat jumlah pembiayaan BUS & UUS terhadap UMKM baik penggunaan untuk modal kerja maupun investasi meningkat setiap tahunnya. ini jelas membuktikan jika peran dari Bank Syariah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana dengan adanya pembiayaan untuk UMKM akan membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, sehingga pengangguran berkurang dan jumlah penduduk miskin juga akan berkurang.

Penyebab terjadinya masalah kemiskinan bisa dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas tersebut bisa dijelaskan dari Indeks Pembangunan Manusia. Apabila IPM menurun maka produktivitas kerja penduduk akan menurun. Menurunnya produktivitas kerja penduduk berdampak pada perolehan pendapatan masyarakat dimana juga rendah. Seperti yang diketahui, apabila pendapatan masyarakat rendah maka akan menyebabkan tingginya angka atau jumlah kemiskinan (Abie, 2017).

Gambar 1.2 Persentase Tingkat IPM Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar yang disajikan tersebut, terlihat tingkat IPM mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2019. Dengan mengalami kenaikan ini, menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Karena IPM berfungsi menghitung kualitas kehidupan manusia itu sendiri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Suhariyanto, menyatakan walaupun tingkat IPM naik dari tahun ke tahun, kondisi pembangunan manusia di tanah air belum merata di masing-masing provinsi. Ini disebabkan perkembangan 4 indikator yang berbeda-beda. Indikator tersebut antara lain indikator umur harapan hidup, indikator harapan lamanya bersekolah, indikator rata-rata lamanya bersekolah, serta indikator tingkat standar kehidupan yang layak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmarga (2011), IPM berperan dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan meningkatnya IPM, maka kualitas hidup manusia juga meningkat, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor pengurangan terjadinya penduduk miskin. Angka IPM memiliki 3 bagian penting dalam menghitung kualitas hidup manusia antara lain kesehatan, dan pendidikan, serta standar hidup yang layak di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judulnya **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah (BUS & UUS) Dan Indeks Pembangunan**

Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus : 33 Provinsi di Indonesia)”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap kemiskinan di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja sebagai variabel control terhadap kemiskinan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap kemiskinan di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh tenaga kerja sebagai variabel control terhadap kemiskinan di Indonesia

